

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA
SERANG 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Dinas Komunikasi dan



Informatika Kota Serang Tahun 2023-2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian, serta untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Serang.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi perbaikan di masa

mendatang. Penyusunan laporan ini mengacu pada berbagai data primer dan sekunder, termasuk hasil survei lapangan, dokumen resmi, serta kebijakan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang 2018-2023.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada tim survei, para petugas lapangan, serta seluruh perangkat daerah yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang atas data statistik yang sangat mendukung proses analisis.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan data

maupun analisis yang disajikan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi Pemerintah Kota Serang maupun bagi masyarakat luas, serta menjadi pijakan dalam mewujudkan visi Kota Serang sebagai “Kota Smart 2025.”

Serang, November 2024

Kepala Diskominfo Kota Serang

Arif Rahman Hakim, S.Sos. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran, Target dan Keluaran	7
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM INDIKATOR	
KINERJA PEMBANGUNAN.....	10
2.1. Tinjauan Umum Kinerja	10
2.1. Indikator Kinerja Pembangunan	15
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Pendekatan Penelitian	24

3.2. Metode Pengumpulan Data.....	28
3.3. Populasi Dan Sampel Penelitian	29
3.3.1. Populasi dan Sampel Rumah Tangga.....	29
3.3.2. Populasi Kecamatan.....	31
3.3.3. Populasi Perangkat Daerah (PD)	31
3.4. Teknik Analisis Data Penelitian	32
3.4.1. Uji Coba Instrumen.....	32
3.4.2. Pelatihan Petugas Lapangan (Enumerator). 32	
3.4.3. Pelaksanaan Survei	33
3.4.4. Pelaksanaan Survei	33
BAB IV PEMBAHASAN	35
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	35
4.2. Deskripsi Data Penelitian.....	44
4.2.1. Sampel Rumah Tangga	52
4.2.2. Sampel Kecamatan.....	62
4.2.3. Sampel Perangkat Daerah (PD)	70
4.3. Analisis Berdasarkan Bidang Urusan	82
4.3.1. Bidang Statistik.....	82

4.3.2. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika	86
4.3.3. Bidang Urusan Persandian.....	102
BAB V PENUTUP.....	105
5.1. Simpulan	105
5.2. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang memegang peranan strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, persandian, dan komunikasi. Prinsip Good Governance menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas ini, yang mencakup profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Implementasi prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program Diskominfo dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap layanan digital, peran Diskominfo semakin penting sebagai ujung tombak

dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap visi Kota Serang sebagai "Pusat Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan Menuju Kota Smart 2025", Diskominfo juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang sejalan dengan Prinsip Good Governance. Hal ini mencakup penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan data, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis teknologi, dan efisiensi dalam pelayanan publik di berbagai sektor, Diskominfo dituntut untuk menyusun dan mengevaluasi indikator kinerja pembangunan (IKP) yang relevan, terukur, dan berbasis data. Penyusunan IKP ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan telah berjalan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota

Serang 2018-2023 yang mengacu pada RPJPD 2008-2025.

Indikator Kinerja Pembangunan yang disusun oleh Diskominfo Kota Serang mencakup tiga bidang utama, yaitu, dengan analisis relevansi terkini yang mencerminkan kebutuhan masyarakat modern dan perubahan prioritas strategis berdasarkan data terbaru. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator tetap selaras dengan perkembangan teknologi, tantangan global, dan kebutuhan lokal.

1. Komunikasi dan Informatika: Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan komunikasi serta pemanfaatan teknologi informasi di seluruh wilayah Kota Serang.
2. Persandian: Meningkatkan keamanan informasi dan tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan melindungi privasi masyarakat.

3. Penguatan Pemberdayaan Informasi Publik: Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi.

Laporan ini disusun berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui survei langsung menggunakan kuesioner pada rumah tangga, perangkat daerah (PD), dan aparat kecamatan di Kota Serang. Data ini kemudian dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya untuk mengevaluasi tren perkembangan kinerja pembangunan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian. Analisis menunjukkan peningkatan signifikan dalam proporsi rumah tangga dengan akses internet hingga 99,72% pada tahun 2023, meskipun terdapat sedikit penurunan pada 2024. Selain itu, penggunaan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah mengalami peningkatan pesat dari 66% menjadi

97%, mencerminkan upaya penguatan keamanan data oleh Diskominfo. Namun, tantangan tetap ada pada pemerataan infrastruktur digital, khususnya di wilayah kecamatan tertentu.

Selain itu, indikator kinerja yang diukur memberikan gambaran penting tentang bagaimana Diskominfo mendukung agenda nasional "Satu Data Indonesia". Prinsip Good Governance diwujudkan melalui integrasi data yang lebih baik, mengurangi duplikasi, dan memastikan bahwa data yang tersedia dapat digunakan untuk perencanaan strategis secara efisien. Diskominfo Kota Serang tidak hanya berperan sebagai pengelola data, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong sinergi antar perangkat daerah untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas maksimal.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penyusunan laporan akhir Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran capaian Diskominfo dalam mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023.
2. Menyediakan bahan evaluasi untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan di tahun mendatang.
3. Memastikan keselarasan antara kebijakan Diskominfo dengan visi pembangunan Kota Serang menuju Kota Smart 2025.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kota Serang dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami capaian serta tantangan yang dihadapi Diskominfo. Tantangan utama yang dihadapi tahun sebelumnya mencakup pemerataan infrastruktur digital, terutama di

kecamatan dengan akses terbatas; memastikan keamanan data di tengah ancaman siber yang semakin kompleks; serta meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mendukung adopsi teknologi secara lebih luas. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah dalam implementasi kebijakan 'Satu Data Indonesia' juga membutuhkan peningkatan agar data yang tersedia lebih akurat dan dapat digunakan untuk perencanaan strategis.

1.2.Maksud, Tujuan, Sasaran, Target dan Keluaran

a) Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Diskominfo Kota Serang Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian pembangunan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian. Laporan ini berfungsi sebagai referensi untuk mengevaluasi keberhasilan

program yang telah dijalankan serta menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis di masa mendatang.

Adapun tujuan dari dibuatnya laporan indicator kinerja Pembangunan Diskominfo Kota Serang periode tahun 2024 adalah :

1. Menyediakan data dan informasi akurat mengenai capaian kinerja Diskominfo dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
2. Mengevaluasi tingkat keberhasilan program prioritas Diskominfo pada tahun 2023.
3. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja Diskominfo pada tahun berikutnya.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kota

Serang Tahun 2023

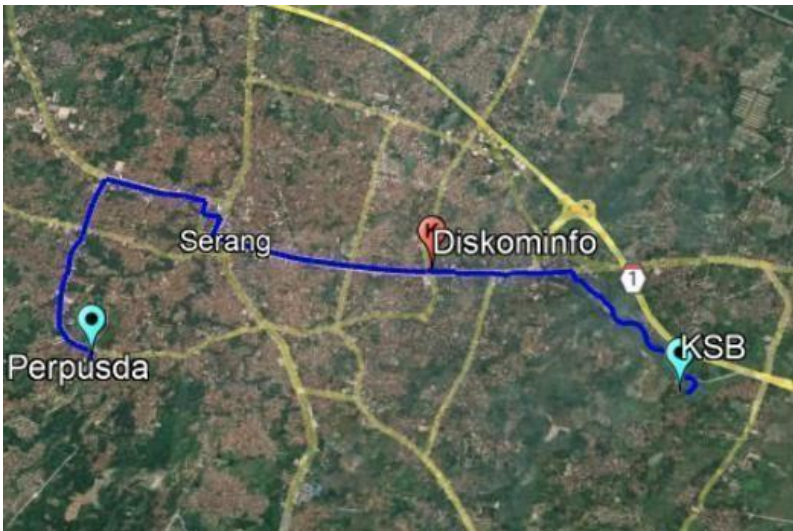
Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah). Angka yang menggambarkan bagian dari penduduk pada rentang kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMA/Diploma/Sarjana, yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan SD/SMP/SMA/Diploma/Sarjana.

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2023
1	Tamat SD	171.129
2	Tamat SMP	87.584
3	Tamat SMA	157.586
4	Diploma (D1/D2/D3)	12.193
5	Sarjana S1	40,043

6	Sarjana S2	4.001
7	Sarjana S3	211

Akses Eksisting

1. Fiber Optik



Dari tahun 2021 sd 2024 sudah dilakukan penarikan FO sejauh 11 KM untuk mensupport :

- 17 OPD,

- 6 CCTV di area Jalan,
- 1 Kelurahan, dan
- 3 Videotron.

2. *Wireless*

Untuk perangkat Wireless sudah mensupport :

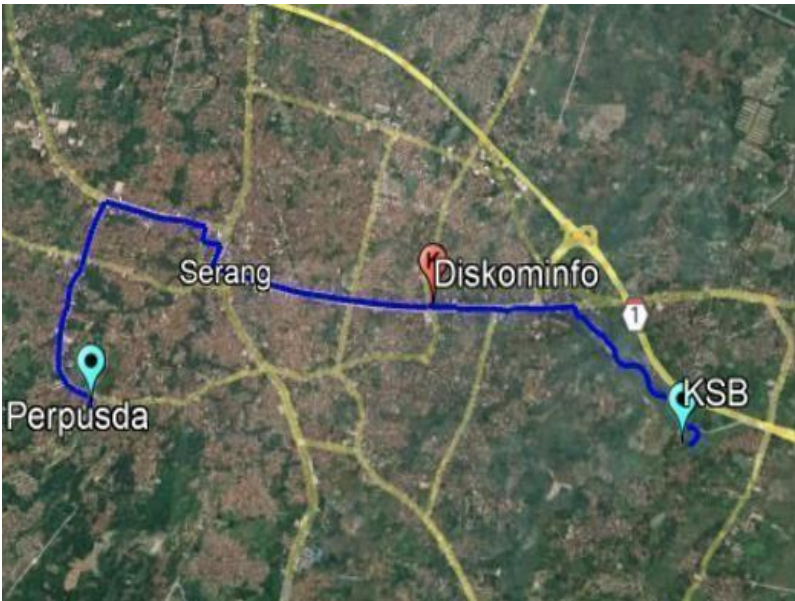
- *32 OPD,*
- *67 kelurahan,*
- *15 CCTV di area Jalan*
- *3 wifi public, dan*



Untuk perangkat Wireless sudah mensupport :

- 32 OPD,
- 67 kelurahan,
- 15 CCTV di area Jalan
- 3 wifi public, dan
- Untuk akses Wireless terdapat 23 Kelurahan dan 2 OPD yang menggunakan Tower

Akses Fiber Optic



Dari tahun 2021 sd 2024 sudah dilakukan penarikan FO
sejauh 11 KM untuk mensupport :

- a. 16 ODP
- b. 7 CCTV
- c. 3 Videotron

No	16 OPD	7 CCTV	3 Vidiotron
1	BKPSDM	BRIMOB 1 POCIS KEPANDEAN	Videotron Kepandean
2	BAPENDA		Videotron Cikulur
3	BAPPEDA		Vidiotron Alun-alun
4	BPKAD	LONTAR	
5	DP3AKB	MAGERSARI	1 Kelurahan Yaitu Kelurahan Lontar
6	SETDA	ALUN-ALUN	
7	BPPBJ		
8	PERKIM		
9	DISTAN		
10	DISPARPORA		
11	INSPEKTORAT		
12	DISNAKER		
13	DPMPTSP		
14	DINKES		
15	PERPUSDA		
16	DLH		
17	GEDUNG JUANG		

Akses Wireless

Menggunakan Tower

Untuk mensupport akses wireless dari tahun 2018 sd 2023 sudah dilakukan pemasangan tower untuk berikut

1. DIKOMINFO	3. KECAMATAN KASEMEN
2. SATPOLPP	4. GEDUNG JUANG

22 KELURAHAN

1. KEL. DALUNG
2. KEL. UMBUL TENGAH
3. KEL. KARUNDANG
4. KEL. KEPUREN
5. KEL. CIPETE
6. KEL. NYAPAH
7. KEL. CURUG MANIS
8. KEL. PABUARAN

9. KEL. PANCALAKSANA
10. KEL. PASULUHAN
11. KEL. TINGGAR
12. KEL. TEGALSARI
13. KEL. SUKAWANA
14. KEL. UNYUR
15. KEL. SAWAH LUHUR
16. KEL. PENGAMPELAN
17. KEL. CILOWONG
18. KEL. PIPITAN
19. KEL. KALANG ANYAR
20. KEL. LEBAKWANGI
21. KEL. LIALANG
22. EL. KEMANISAN

CCTV

Terdapat 34 CCTV yang terpasang di area Publik seperti di jalan raya dan pelayanan di OPD

1. CCTV CICERI 1
2. CCTV TAMAN SARI
3. CCTV FIX CICERI 2
4. CCTV ROYAL
5. CCTV ALUN-ALUN MONUMEN
6. CCTV ALUN-ALUN 1
7. CCTV MAGERSARI
8. CCTV ALUN-ALUN 2
9. CCTV BRIMOB
10. CCTV RAU
11. CCTV PANDEAN
12. CCTV KALIGANDU
13. CCTV SAYABULU

14. CCTV BPKAD
15. CCTV BATOK BALI
16. CCTV DISNAKER
17. CCTV SUMUR BOR
18. CCTV DISDUKCAPIL
19. CCTV PARUNG
20. CCTV KEC. WALANTAKA
21. CCTV SERANG TIMUR
22. CCTV KEC. CURUG
23. CCTV KEBON JAHE
24. CCTV KEC. TAKTAKAN
25. CCTV ALUN – ALUN
26. CCTV PASAR LAMA
27. CCTV POCIS
28. CCTV KEC. CIPOCOK
29. CCTV KEPANDEAN
30. CCTV TERMINAL BANTEN

31. CCTV KALIGANDU

32. CCTV STADION

33. CCTV BALAIKOTA SERANG

34. CCTV KEC. SERANG

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang sesuai Peraturan Walikota Serang Nomor 121 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang, sebagai berikut:

b. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan

pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika,

urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;

4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan pemimpin perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan

kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.

b. Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
- 2) menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- 3) menyelenggarakan pembinaan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- 4) menyelenggarakan pengawasan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian,

- dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- 5) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 6) pelaporan.
- c. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
1. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
 - b) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
4. Melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
9. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
10. Melaksanakan pengelolaan barang/ perlengkapan / aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
12. Melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

3. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan komunikasi dan informatika, infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, layanan teknologi komunikasi dan informatika, dan tata kelola, keamanan informasi dan persandian.
- b) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
- Penyelenggaraan infrastruktur teknologi komunikasi dan Informatika;
 - Penyelenggaraan layanan teknologi komunikasi dan Informatika;
 - Penyelenggaraan tata kelola, keamanan dan persandian; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

- c) Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Layanan E-Government

- a. Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan fasilitasi dibidang layanan e-government, perencanaan dan standarisasi aplikasi, pengembangan dan integrasi aplikasi serta pemeliharaan dan implementasi aplikasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan perancangan dan standarisasi aplikasi;
 - 2) Penyelenggaraan pengembangan dan integrasi aplikasi;

- 3) Penyelenggaraan pemeliharaan dan implementasi aplikasi; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- c. Bidang Layanan E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
- a. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan fasilitasi di bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik, diseminasi informasi media elektronik, diseminasi informasi media cetak, dan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik.

- b. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan diseminasi informasi media elektronik;
 - 2) Penyelenggaraan diseminasi informasi media cetak; dan
 - 3) Penyelenggaraan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
 - c. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi

- a. Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan statistik, dokumentasi dan pengelolaan data, serta evaluasi informasi.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Statistik dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan statistik;
 - 2) Penyelenggaraan dokumentasi dan pengelolaan data;
 - 3) Penyelenggaraan evaluasi informasi; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- c. Bidang Statistik, Dokumentasi Dan Evaluasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang didukung oleh 74 pegawai yang terdiri dari 27 orang PNS dan 66 orang Non PNS. Adapun komposisi pegawai adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	%
1	PNS	27	29,03
2	Non PNS	66	70,96
Jumlah		93	100,00

b. Komposisi Esselon PNS

No	Esselon PNS	Jumlah	%
1	Esselon II.b	1	3,70
2	Esselon III.a	1	3,70
3	Esselon III.b	4	14,81
4	Esselon IV.a	15	55,56
5	Jabatan Fungsional Terlaksana	3	12,50
6	Non Esselon / Pelaksana	3	12,50
Jumlah		27	100,00

c. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

No	Uralan	Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV					Total
		a	b	c	d	1	a	b	C	d	i	a	b	c	d	i	a	B	c	D	1	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	-	-	-	3	2
3	Bidang Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	2	3	1	-	-	-	1	6
4	Bidang Layanan E-Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	5	1	-	-	-	1	6

5	Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikas i Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	-	-	1	4
6	Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	4
Jumlah		-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	5	9	18	2	2	1	-	7	27

b) Komposisi Pendidikan PNS

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	0	0
2	SLTP	0	0
3	SLTA	0	0
4	DIII	2	7,41
5	Sarjana (S1)	14	51,85
6	Pasca Sarjana (S2)	11	40,74
Jum.lah		27	100,00

c) Komposisi Umur PNS

No	Umur	Jumlah	%
1	< 25 tahun	1	3,70
2	25 - 30 tahun	1	3,70
3	31 - 40 tahun	11	40,74
4	41 - 50 tahun	10	37,03
5	51 - 58 tahun	4	14,81

6	> 58 tahun	0	0
Jumlah		27	100,00

b) Sasaran

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya pemahaman yang komprehensif mengenai indikator kinerja di bidang komunikasi, informatika, dan persandian, baik pada tingkat perangkat daerah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Serta tersedianya Data Indikator Kinerja Pembangunan Diskominfo Kota Serang Tahun Anggaran 2024 dalam bidang komunikasi, informatika dan persandian.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang diperlukan sarana

dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan unsur yang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.2

Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023

NO	NAMABARANG	JUMLAH
1	Sepeda Motor	14
2	Mobil	7
3	Laptop	27
4	P.C Unit	28
5	Printer	21
6	Scanner	2
7	Instalasi Penangkal Petir	2
8	Lemari Besi	3
9	WIFI OPD	32
10	Televisi	33
11	Server	6

12	Ups	1
13	AC	17

NO	NAMABARANG	JUMLAH
14	Camera	4
15	Meja Biro	32
16	Meja Front Office	1
17	Meja Tamu	2
18	Meja Rapat	1
19	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1
20	Meja Kerja Pejabat Esselon III	5
21	Meja TIK	1
22	Meja Operator	1
23	Sofa	6
24	CCTV	24

25	Router	37
26	Telephone (PABX)	33
27	Mikrotik Router Wireless	33
28	Radio AP/Unifi LR	4
29	Ubiquiti Unifi ac 2.4GHz/UAP-AC-LITE	32
30	Ubiquiti airMAX LiteBeam SAC Gen2 23dbi / LBE - SAC- Gen2	33
31	Mesin Absensi	2
32	Mesin Ketik	1
33	Mesin Potong Rumput	1
34	Lemari ES	5
35	Faximile	1
36	Handphone	7
37	Headphone	5
38	Speaker	3

39	Kursi Rapat	14
40	Kursi Staff	10
41	Kursi Kasi	14
42	Kursi Esselon	4

c) Target

Target dari kegiatan ini adalah selain tersedianya Data Indikator Kinerja Pembangunan Diskominfo Kota Serang Tahun Anggaran 2024, juga tersusunnya dokumen resmi yang dapat menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan di masa depan, terutama untuk mendukung RPJMD Kota Serang dan agenda nasional seperti "Satu Data Indonesia".

d) Keluaran

1. Output dari Pekerjaan Penyusunan Data Indikator Kinerja Pembangunan Diskominfo Kota Serang Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Anggaran 2024 adalah Tersusunnya data indikator kinerja pembangunan dalam bidang komunikasi, informatika dan persandian pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Serang.

2. Outcome dari Pekerjaan Penyusunan Data Indikator Kinerja Pembangunan Diskominfo Kota Serang Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Anggaran 2024 sebanyak 1 (satu) dokumen.
3. Dokumen laporan akhir Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Diskominfo Kota Serang Tahun 2024.
4. Rekomendasi strategis berbasis data untuk pengambilan kebijakan Diskominfo di tahun mendatang.

1.3.Landasan Hukum

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Anggaran Tahun 2024

berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menegaskan otonomi daerah sebagai dasar pengaturan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan data dan teknologi informasi oleh Diskominfo.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Memberikan landasan legal terkait pembentukan Kota Serang dan peran Diskominfo sebagai bagian dari struktur pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Mengatur pentingnya penyelenggaraan statistik sektoral oleh instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan pembangunan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menegaskan statistik sebagai urusan wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk bidang komunikasi dan informatika. Undang-undang ini telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Mengatur mekanisme evaluasi kinerja pembangunan oleh instansi pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mengatur tata kelola perangkat daerah, termasuk Diskominfo, untuk memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi

pemerintahan yang lebih efektif. Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Memberikan kerangka kebijakan untuk integrasi data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mengatur mekanisme perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan indikator kinerja pembangunan.
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025. Menetapkan visi pembangunan jangka panjang

Kota Serang, termasuk sektor komunikasi dan informatika.

10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Diubah oleh Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 untuk mengatur lebih lanjut struktur organisasi perangkat daerah, termasuk Diskominfo.

11. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Menjelaskan tugas dan fungsi Diskominfo dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

1.4.Sistematika Penulisan

Laporan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP)

Diskominfo Kota Serang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Sasaran, Target, Keluaran, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

Bab ini berisikan Landasan teori yang meliputi Tinjauan Umum Kinerja dan Indikator Kinerja Pembangunan.

BAB III METODE KAJIAN

Bab ini berisikan metode kajian yang digunakan meliputi Pendekatan Kajian, Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel Kajian serta Teknik Analisis Data Kajian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini merupakan hasil dari kajian yang meliputi Deskripsi Objek Kajian, Deskripsi Data Kajian, dan Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang di Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN UMUM INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

2.1. Tinjauan Umum Kinerja

Tinjauan umum kinerja mencakup evaluasi capaian dan tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang dalam bidang komunikasi, informatika, dan persandian. Indikator yang digunakan dirancang untuk mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, serta relevansi terhadap kebutuhan masyarakat di tahun 2024. Berikut indikator kinerja yang digunakan:

1. Aksesibilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):

- a. Proporsi rumah tangga dengan akses internet:

Pada tahun 2023 mencapai 99,72%, namun sedikit menurun pada 2024. Indikator ini

penting untuk mengukur pemerataan akses digital.

- b. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer/laptop: Pada tahun 2024 meningkat menjadi 40,30% dari 35,47% pada 2023, menunjukkan tren adopsi perangkat digital di masyarakat.
- c. Rasio telepon genggam dan telepon tetap per jumlah penduduk: Tetap menjadi tolok ukur konektivitas komunikasi di wilayah kota.

2. Keamanan Informasi:

- a. Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi komunikasi: Meningkat signifikan dari 66% pada 2023 menjadi 97% pada 2024, mencerminkan komitmen terhadap keamanan data.

- b. Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi:
Indikator ini digunakan untuk mengukur adopsi solusi teknologi dalam operasional perangkat daerah.

3. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat:

- a. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) aktif per kecamatan: Meningkat dari 35 pada 2023 menjadi 54 pada 2024, menunjukkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.
- b. Proporsi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan literasi digital: Indikator ini menilai keberhasilan Diskominfo dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi.

4. Infrastruktur Teknologi dan Layanan Komunikasi:

- a. Jumlah titik jaringan internet publik yang tersedia: Indikator ini memastikan ketersediaan

layanan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pribadi.

- b. Tingkat cakupan layanan telekomunikasi di wilayah kota: Tetap pada 100% wilayah terlayani, mencerminkan keberhasilan dalam pemerataan infrastruktur teknologi.

5. Pemanfaatan Data Terintegrasi (Indikator Baru):

- a. Proporsi perangkat daerah yang menggunakan data terintegrasi dalam perencanaan dan pelaporan: Indikator ini menilai efektivitas program “Satu Data Indonesia” di tingkat kota.

6. Indeks Literasi Digital Masyarakat Kota Serang (Indikator Baru)

2.1 Mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi: Ini penting untuk memastikan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi secara berkelanjutan.

Indikator-indikator ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengevaluasi kinerja Diskominfo dalam mendukung visi Kota Serang sebagai "Kota Smart 2025" dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan daerah. Data yang dihasilkan juga menjadi bahan evaluasi dan acuan pengambilan kebijakan strategis untuk tahun-tahun mendatang.

2.1. Indikator Kinerja Pembangunan

Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang. IKP ini berfungsi sebagai panduan strategis dalam memastikan keselarasan antara kebijakan Diskominfo dengan visi pembangunan Kota Serang menuju Kota Smart 2025, serta mendukung prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan.

Indikator yang disusun mencakup tiga bidang utama, yaitu komunikasi, informatika, dan persandian. Berikut adalah indikator-indikator yang dipertimbangkan relevan untuk tahun 2024:

1. Komunikasi

Indikator di bidang komunikasi dirancang untuk mengevaluasi keberhasilan Diskominfo dalam menyediakan akses komunikasi yang merata dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Indikator yang digunakan meliputi:

- a. Cakupan layanan telekomunikasi: Pada 2024, cakupan layanan telekomunikasi tetap mencapai 100% wilayah Kota Serang. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan akses komunikasi yang merata.
- b. Jumlah rumah tangga dengan akses internet: Menurun dari 99,72% pada 2023 menjadi 93,7% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pemerataan akses di kecamatan tertentu.

- c. Jumlah jaringan internet publik: Indikator ini menjadi penentu dalam meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas pribadi. Cakupan jaringan tetap stabil pada 266 titik di seluruh kota.
- d. Partisipasi masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM): Peningkatan jumlah KIM aktif dari 35 pada 2023 menjadi 54 pada 2024 mencerminkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung penyebaran informasi yang efektif.

2. Informatika

Indikator di bidang informatika bertujuan untuk mengukur tingkat adopsi teknologi informasi di Kota Serang. Indikator utama meliputi:

- a. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer/laptop: Naik menjadi 40,30% pada 2024 dari 35,47% pada 2023. Tren ini menunjukkan peningkatan adopsi perangkat digital.
- b. Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi di perangkat daerah: Persentase perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi terus meningkat. Hal ini mendukung efisiensi operasional pemerintahan.
- c. Penggunaan data terintegrasi untuk pengambilan kebijakan: Indikator baru ini mengukur efektivitas implementasi program "Satu Data Indonesia." Proporsi perangkat daerah yang menggunakan data terintegrasi meningkat dari 80% pada 2023 menjadi 90% pada 2024.

d. Indeks literasi digital masyarakat Kota Serang:

Indikator ini digunakan untuk menilai pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Literasi digital masyarakat menunjukkan tren positif dengan keberhasilan program edukasi yang dilakukan Diskominfo.

3. Persandian

Indikator di bidang persandian difokuskan pada keamanan informasi dan tata kelola data.

Indikator yang digunakan meliputi:

- a. Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi: Meningkat signifikan dari 66% pada 2023 menjadi 97% pada 2024, menunjukkan komitmen Diskominfo dalam melindungi keamanan informasi.

- b. Jumlah pelatihan keamanan data untuk aparatur pemerintahan: Peningkatan jumlah pelatihan menjadi 15 program pada 2024 dibandingkan 10 pada 2023, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kapasitas SDM terkait keamanan informasi.
- c. Penerapan teknologi enkripsi pada data pemerintahan: Indikator baru yang menilai tingkat implementasi teknologi enkripsi untuk melindungi data sensitif pemerintahan.

Analisis Indikator

1. Kekuatan (*Strengths*):

- a. Keberhasilan dalam meningkatkan keamanan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat melalui KIM.
- b. Tren positif dalam literasi digital dan adopsi perangkat digital menunjukkan keberhasilan program edukasi Diskominfo.

2. Kelemahan (*Weaknesses*):

- a. Penurunan akses internet di rumah tangga memerlukan intervensi strategis untuk memastikan pemerataan infrastruktur.
- b. Implementasi data terintegrasi masih menghadapi tantangan koordinasi lintas perangkat daerah.

3. Peluang (*Opportunities*):

- a. Dukungan dari program "Satu Data Indonesia" memberikan kerangka kerja untuk integrasi data yang lebih baik.
- b. Teknologi baru seperti 5G dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses komunikasi dan meningkatkan efisiensi operasional.

4. Ancaman (*Threats*):

- a. Ancaman siber yang semakin kompleks memerlukan peningkatan kapasitas keamanan data yang berkelanjutan.
- b. Ketimpangan digital antar kecamatan dapat memperlambat pencapaian visi Kota Smart 2025.

Indikator-indikator ini memberikan panduan strategis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program Diskominfo Kota Serang pada

tahun 2024. Penyusunan indikator ini juga mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data dan terukur, sesuai dengan agenda pembangunan nasional dan visi Kota Serang.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam laporan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Diskominfo Kota Serang Tahun 2024 menggunakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai capaian kinerja, tantangan, dan potensi perbaikan dalam bidang komunikasi, informatika, dan persandian.

Pendekatan kuantitatif memiliki keunggulan validasi sains alami, yang mencakup:

- Prosedur standar yang eksplisit.
- Pengukuran numerik yang presisi.
- Kemungkinan replikasi hasil penelitian (Neuman, 2006).

Melalui pendekatan ini, data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan netral. Studi kuantitatif menekankan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Netralitas dan Objektivitas: Proses penelitian dilakukan tanpa intervensi subjektif dari peneliti.
2. Standarisasi Prosedur: Semua tahapan penelitian mengikuti protokol yang telah ditetapkan untuk memastikan hasil dapat direplikasi.
3. Pengukuran Numerik: Data dikonversi ke bentuk numerik untuk memudahkan analisis statistik.

Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan sebagai pelengkap dalam memberikan konteks yang lebih dalam terhadap hasil yang diperoleh secara kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial, pandangan masyarakat,

serta dinamika yang memengaruhi pencapaian indikator kinerja. Creswell (1998) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan deskripsi kompleks melalui laporan terperinci berdasarkan pandangan responden dan situasi yang alami. Dalam pendekatan ini:

1. Kecukupan Data: Data yang dihimpun akan terus dikumpulkan hingga mencapai tingkat kejenuhan (saturation), di mana tidak ada informasi baru yang signifikan ditemukan (Neuman, 2003).
2. Kompleksitas Gambaran: Pendekatan ini menekankan pada penjelasan mendalam terhadap fenomena yang kompleks, seperti dinamika partisipasi masyarakat dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
3. Konteks Sosial: Memberikan perspektif yang lebih holistik mengenai tantangan yang dihadapi

Diskominfo, seperti kesenjangan digital antarwilayah.

Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengintegrasikan keunggulan masing-masing. Pendekatan kuantitatif memberikan gambaran angka yang objektif dan dapat diukur, sedangkan pendekatan kualitatif melengkapi dengan narasi kontekstual yang menjelaskan makna dari angka tersebut.

Dalam konteks tahun 2024, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi data untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti, yang sejalan dengan agenda nasional "Satu Data Indonesia". Selain itu, pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi dampak kebijakan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian terhadap pencapaian visi Kota Serang sebagai "Kota Smart 2025".

3.2. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada tiga kategori utama responden:

- a. Rumah tangga.
- b. Aparat kecamatan.
- c. Perangkat Daerah (PD).

Kuesioner dirancang untuk mengukur indikator kinerja utama seperti akses teknologi informasi, partisipasi dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan keamanan data.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- a. BPS Kota Serang: Data demografi, distribusi rumah tangga, dan statistik wilayah.

- b. Dokumen internal Diskominfo: Laporan tahunan dan perencanaan strategis.
- c. RPJMD Kota Serang 2018-2023: Target pembangunan yang relevan.

3.3. Populasi Dan Sampel Penelitian

3.3.1. Populasi dan Sampel Rumah Tangga

Populasi:

Jumlah rumah tangga di Kota Serang berdasarkan data BPS Tahun 2023 adalah 177.028 rumah tangga.

Sampel:

Menggunakan metode stratified random sampling, dengan strata berdasarkan kecamatan.

Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus

Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- N : Populasi (177.028 rumah tangga).
- e : Tingkat kesalahan (5% atau 0,05).

Perhitungan:

$$n = \frac{177.028}{1 + 177.028(0,05)^2} = 399$$

Jumlah sampel yang diambil: 400 rumah tangga, dengan distribusi proporsional ke setiap kecamatan.

Tabel1. Proporsi Sampling

Kecamatan	Populasi Rumah Tangga	Proporsi (%)	Sampel
Cipocok Jaya	14.553	8,2%	33
Curug	25.034	14,1%	56
Kasemen	24.981	14,1%	56
Serang	60.957	34,4%	138
Taktakan	25.07	14,2%	57

Walantaka	26.433	14,9%	60
Total	177.028	100%	400

3.3.2. Populasi Kecamatan

Populasi kecamatan mencakup **6 kecamatan** di

Kota Serang:

1. Cipocok Jaya.
2. Curug.
3. Kasemen.
4. Serang.
5. Taktakan.
6. Walantaka.

Semua kecamatan dimasukkan sebagai responden untuk memastikan keterwakilan penuh.

3.3.3. Populasi Perangkat Daerah (PD)

Jumlah perangkat daerah di Kota Serang sebanyak **32 perangkat daerah**. Semua PD yang

terlibat dalam bidang komunikasi, informatika, dan persandian dimasukkan dalam penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data Penelitian

3.4.1. Uji Coba Instrumen

Sebelum pelaksanaan survei, instrumen kuesioner diuji coba kepada 20 responden untuk mengukur validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha dengan hasil:

$$\text{Alpha} = 0,85$$

Hasil ini menunjukkan instrumen memiliki reliabilitas tinggi (nilai $> 0,7$).

3.4.2. Pelatihan Petugas Lapangan (Enumerator)

Petugas lapangan diberikan pelatihan selama 2 hari untuk memastikan pemahaman terhadap instrumen survei dan tata cara pengumpulan data. Pelatihan mencakup:

- Teknik wawancara.
- Penggunaan kuesioner .
- Etika penelitian di lapangan.

3.4.3. Pelaksanaan Survei

Survei dilakukan pada September hingga Oktober 2024. Enumerator mendatangi rumah tangga dan perangkat daerah secara langsung untuk mengisi kuesioner, dengan supervisi dari tim Diskominfo.

3.4.4. Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan survei mengikuti jadwal berikut:

Tahap	Waktu	Kegiatan
Perencanaan	Januari 2024	Penyusunan instrumen dan pelatihan.
Pengumpulan Data	Februari-Maret 2024	Survei lapangan dan pengumpulan dokumen.

Pengolahan Data	April 2024	Analisis statistik dan perbandingan.
Penyusunan Laporan	Mei 2024	Penulisan laporan akhir.

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghasilkan deskripsi indikator kinerja yang akurat dan berbasis data.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian tentang Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2024. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang selaras dengan misi dari Kota Serang yang salah satu tujuannya terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan strategi peningkatan infrastruktur dan layanan teknologi informasi komunikasi penunjang implementasi *Smart City* Kota Serang. Selain itu Diskominfo juga memiliki tujuan yang selaras dengan misi Kota Serang meningkatkan tata pemerintahan yang baik dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis

teknologi informasi melalui strategi peningkatan pelayanan egovernment, informasi publik dan penyediaan data statistik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan serta 67 kelurahan, setelah sebelumnya pada tahun 2013 sebanyak 30 desa mengalami perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Hingga saat ini, pemerintahan Kota Serang tidak mengalami perubahan jumlah kecamatan, sedangkan jumlah kelurahan pada Tahun 2017 mengalami penambahan satu kelurahan di Kecamatan Taktakan yaitu pemekaran Kelurahan Cilowong menjadi Kelurahan Cilowong dan Cibendung. Pemerintahan Kota Serang dipimpin oleh seorang Walikota. Berdasarkan susunan Pemerintahan Kota Serang periode 2018-2023, dalam menjalankan

pemerintahan walikota dibantu oleh sekretariat daerah, lembaga teknis daerah, dan dinas daerah.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang sesuai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang adalah untuk melaksanakan Tugas Pokok yang terdiri atas :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang komunikasi dan informatika;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang persandian;
3. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang statistik;
4. Perumusan kebijakan teknis tentang pengembangan dan layanan *e-Government*;
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika;
6. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian;
7. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik;
8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;

9. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang persandian;
10. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang statistik;
11. Pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
12. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
13. Pengelolaan UPT; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kota Serang memiliki luas wilayah sebesar 266,74 km², yang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan. Kota ini memiliki karakteristik wilayah yang cukup beragam, dengan kawasan urban yang menjadi pusat pemerintahan dan layanan publik, serta kawasan pinggiran yang memerlukan perhatian lebih dalam pemerataan infrastruktur teknologi.

Pada tahun 2013, sebanyak 30 desa di Kota Serang mengalami perubahan status menjadi kelurahan, sehingga saat ini seluruh wilayah Kota Serang berstatus kelurahan. Pada tahun 2017, terdapat penambahan satu kelurahan di Kecamatan Taktakan melalui pemekaran Kelurahan Cilowong menjadi Kelurahan Cilowong dan Cibendung.

Kota Serang merupakan wilayah dengan luas 266,74 km², secara astronomis berada pada posisi 50 99' - 60 22' Lintang Selatan dan 106 07' - 106 25' Bujur Timur. Berdasarkan koordinat sistem UTM (Universal Transfer Mercator) Zone 48E, wilayah Kota Serang membentang pada koordinat 618.000 m menuju ke Timur sampai dengan 638.600 m sepanjang 20 km serta 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m ke arah Selatan, yaitu sepanjang 21,7 km. Dengan relief wilayah atau topografi yang cukup datar. Areal Kota

Serang didominasi oleh dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 25 mdpl. Posisi geografis wilayah Kota Serang dikelilingi oleh daratan yang merupakan wilayah Kabupaten Serang. Namun, sebelah Utara Kota Serang berbatasan dengan laut yaitu kawasan Laut Jawa (Sumber : Kota Serang Dalam Angka 2024, BPS Kota Serang 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Kota Serang adalah 723.794 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.713 jiwa/km². Kecamatan Serang memiliki kepadatan tertinggi, sedangkan kecamatan Kasemen dan Walantaka memiliki kepadatan yang lebih rendah. Hal ini menciptakan tantangan dalam pemerataan akses teknologi dan informasi, khususnya di daerah pinggiran.

Penduduk Kota Serang terdiri dari beragam latar belakang sosial dan ekonomi, dengan sebagian besar bekerja di sektor jasa, perdagangan, dan pertanian. Masyarakat perkotaan lebih mudah mengakses layanan komunikasi dan teknologi informasi dibandingkan masyarakat di wilayah pinggiran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Diskominfo Kota Serang dalam bidang komunikasi, informatika, dan persandian, yang selaras dengan misi Kota Serang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Fokus penelitian mencakup:

1. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah.
2. Peningkatan literasi digital masyarakat melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
3. Implementasi program e-government yang mendukung layanan publik berbasis teknologi.
4. Peningkatan keamanan informasi melalui persandian dan pengelolaan data pemerintahan yang terintegrasi.

Deskripsi objek penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang latar belakang, kondisi geografis, serta fokus utama penelitian, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian visi Kota Serang sebagai "Kota Smart 2025"

4.2. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang Tahun 2023 melalui data yang diperoleh dari lapangan. Data utama yang digunakan berupa data primer, yang dikumpulkan langsung dari dinas, instansi, dan objek penelitian yang berkaitan. Data ini diolah untuk menghasilkan analisis yang relevan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, data sekunder, seperti dokumen-dokumen terkait, digunakan sebagai data pendukung untuk memperkaya analisis penelitian.

Dalam penelitian ini, data atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya berupa data primer yang diperoleh dari dinas, instansi

maupun objek yang berkaitan langsung yang kemudian diolah sehingga menghasilkan analisis yang diperlukan dalam keperluan penelitian ini. Sedangkan data-data lainnya yang berupa dokumen-dokumen dijadikan sebagai data pendukung dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Data-data pendukung tersebut didapatkan dengan media wawancara, catatan lapangan serta hasil rekaman dari wawancara dengan objek yang berkaitan dengan penelitian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2023.

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode, termasuk wawancara, pencatatan lapangan, dan dokumentasi hasil survei. Data tersebut kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction): Data yang terkumpul disaring untuk memastikan hanya data yang relevan dengan penelitian yang digunakan.
2. Penyajian Data (Data Display): Data yang telah dipilih disusun dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
3. Verifikasi dan Interpretasi (Verification): Data yang disajikan diverifikasi kembali untuk memastikan validitas, kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna.

Proses ini memungkinkan data yang diperoleh tidak hanya digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah, tetapi juga memberikan wawasan baru dalam memahami indikator kinerja pembangunan di Diskominfo Kota Serang.

Data Primer:

1. Sumber: Kuesioner yang disebarakan kepada rumah tangga, kecamatan, dan perangkat daerah (PD) di Kota Serang.
2. Jenis Informasi:
 - a. Tingkat akses teknologi informasi di masyarakat.
 - b. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi di perangkat daerah.
 - c. Partisipasi masyarakat dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
 - d. Tingkat keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.

Data Sekunder:

1. Sumber: Dokumen resmi dari Diskominfo, RPJMD Kota Serang 2018-2023, laporan BPS

Kota Serang, serta data terkait dari program "Satu Data Indonesia."

2. Jenis Informasi:

- a. Distribusi demografis dan wilayah.
- b. Data historis mengenai indikator kinerja pembangunan.
- c. Kebijakan strategis yang mendukung pelaksanaan program di Diskominfo.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3, penelitian ini menggunakan tiga jenis sampel, yaitu rumah tangga, kecamatan, dan perangkat daerah (PD). Berikut adalah hasil yang diperoleh dari masing-masing sampel:

1. Rumah Tangga:

- a. Jumlah Sampel: 400 rumah tangga, terdistribusi secara proporsional di 6 kecamatan.
- b. Hasil Utama:

- Sebanyak 93,7% rumah tangga memiliki akses internet pada tahun 2024, menunjukkan penurunan dari 99,72% pada tahun 2023.
- Sebanyak 40,30% rumah tangga memiliki komputer/laptop, meningkat dari 35,47% pada tahun sebelumnya.

2. Kecamatan:

- a. Jumlah Sampel: Seluruh 6 kecamatan di Kota Serang menjadi objek penelitian.
- b. Hasil Utama:
 - Cakupan layanan telekomunikasi mencapai 100% di seluruh kecamatan.
 - Kecamatan Serang memiliki jumlah partisipasi masyarakat tertinggi dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

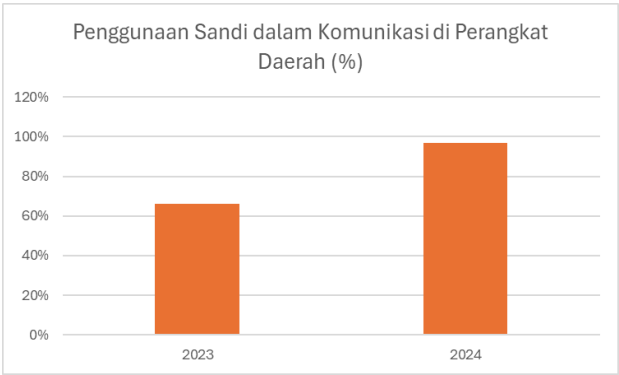
3. Perangkat Daerah (PD):

- a. Jumlah Sampel: 32 perangkat daerah di Kota Serang.
- b. Hasil Utama:
 - Sebanyak 97% perangkat daerah telah menggunakan sandi dalam komunikasi, meningkat signifikan dari 66% pada tahun 2023.
 - Sebagian besar perangkat daerah memanfaatkan data terintegrasi untuk pengambilan keputusan, dengan capaian 90% pada tahun 2024.

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai indikator kinerja pembangunan. Berikut adalah contoh penyajian data:

Tabel 4.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses
Internet (2023-2024)

Tahun	Proporsi Rumah Tangga (%)
2023	99,72%
2024	93,70%



Gambar 4.1. Penggunaan Sandi dalam Komunikasi di
Perangkat Daerah (2023-2024)

Data yang telah dikumpulkan ini menjadi dasar untuk analisis lebih mendalam pada subbab berikutnya. Penekanan pada reduksi, penyajian, dan verifikasi data

memastikan bahwa penelitian ini menghasilkan wawasan yang relevan dan dapat diandalkan untuk evaluasi kinerja Diskominfo Kota Serang.

4.2.1. Sampel Rumah Tangga

Jumlah sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi rumah tangga di Kota Serang yang berjumlah 177.028 rumah tangga (Sumber: Kota Serang Dalam Angka, BPS Kota Serang 2023). Berdasarkan penjelasan di Bab 3, penelitian ini menggunakan margin of error (e) = 5% dan teknik proportional random sampling, menghasilkan jumlah sampel sebanyak 400 rumah tangga.

Pembagian sampel dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah populasi rumah tangga di masing-masing kecamatan untuk memastikan keterwakilan yang adil. Berikut adalah pembagian jumlah sampel di setiap kecamatan:

Tabel 4.2. Jumlah Sampel Penelitian Satuan Rumah

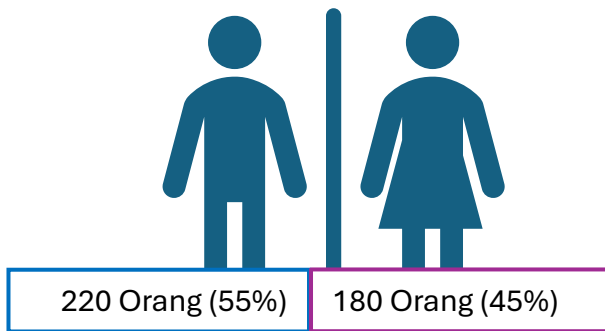
Tangga per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Proporsi (%)	Jumlah Sampel
Cipocok Jaya	14.553	8,2%	33
Curug	25.034	14,1%	56
Kasemen	24.981	14,1%	56
Serang	60.957	34,4%	138
Taktakan	25.07	14,2%	57
Walantaka	26.433	14,9%	60
Total	177.028	100%	400

Ke-400 sampel ini tersebar di 67 kelurahan di Kota Serang, dengan pembagian yang proporsional berdasarkan jumlah RW di setiap kelurahan. Pembagian detail dapat dilihat di Bab 3.

4.2.1.1. Jenis Kelamin Responden Rumah Tangga

Berdasarkan data yang dikumpulkan, komposisi responden rumah tangga berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2. Jumlah Responden Rumah Tangga

Berdasarkan Jenis Kelamin

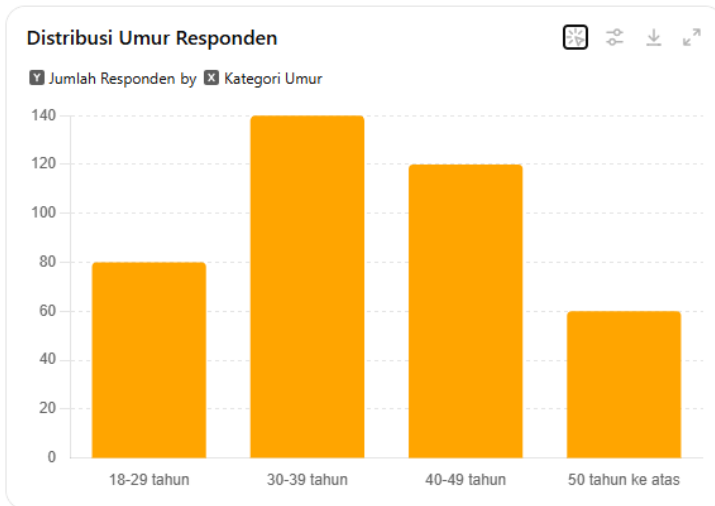
Komposisi ini mencerminkan dominasi responden laki-laki, mengingat keputusan terkait akses teknologi dan komunikasi di tingkat rumah tangga sering kali diwakili oleh kepala keluarga yang mayoritas laki-laki.

4.2.1.2. Umur Responden

Responden rumah tangga dikelompokkan berdasarkan kategori umur sebagai berikut:

1. 18-29 tahun: 20% (80 orang).
2. 30-39 tahun: 35% (140 orang).
3. 40-49 tahun: 30% (120 orang).
4. 50 tahun ke atas: 15% (60 orang).

Sebagian besar responden berada pada kelompok umur produktif (30-49 tahun), yang merupakan populasi utama pengguna layanan komunikasi dan teknologi informasi.



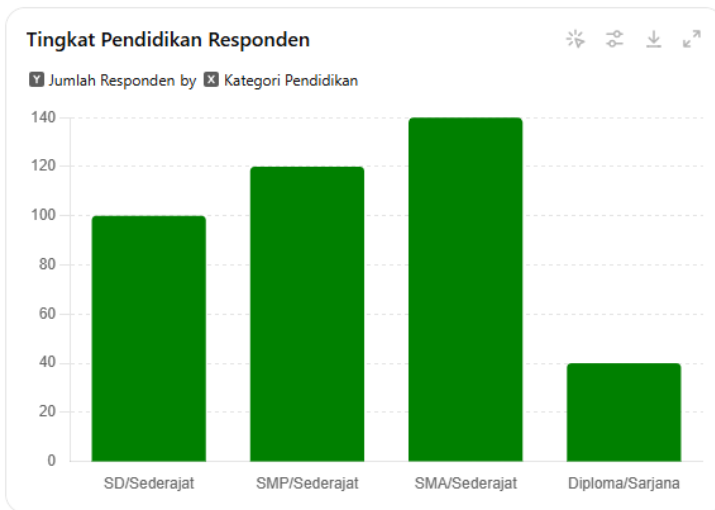
Gambar 4.3. Jumlah Responden Berdasarkan Umur

4.2.1.3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan responden merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat literasi digital di rumah tangga. Berdasarkan data, tingkat pendidikan responden adalah sebagai berikut:

1. SD/Sederajat: 25% (100 orang).
2. SMP/Sederajat: 30% (120 orang).
3. SMA/Sederajat: 35% (140 orang).
4. Diploma/Sarjana: 10% (40 orang).

Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat, yang mencerminkan potensi pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik.



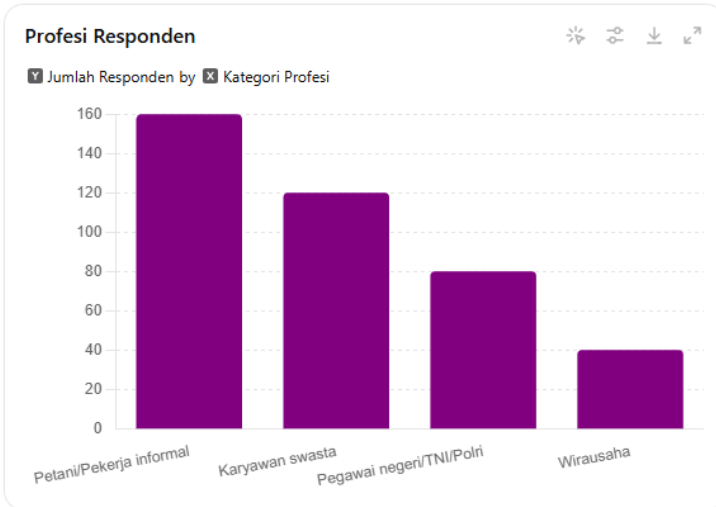
Gambar 4.4. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

4.2.1.4. Profesi Responden

Profesi responden rumah tangga juga menjadi indikator penting dalam memahami kebutuhan akses teknologi informasi. Data menunjukkan profesi responden sebagai berikut:

1. Petani/Pekerja informal: 40% (160 orang).
2. Karyawan swasta: 30% (120 orang).
3. Pegawai negeri/TNI/Polri: 20% (80 orang).
4. Wirausaha: 10% (40 orang).

Responden dengan pekerjaan informal mendominasi, menunjukkan perlunya perhatian khusus pada kelompok ini dalam hal literasi digital dan akses teknologi.



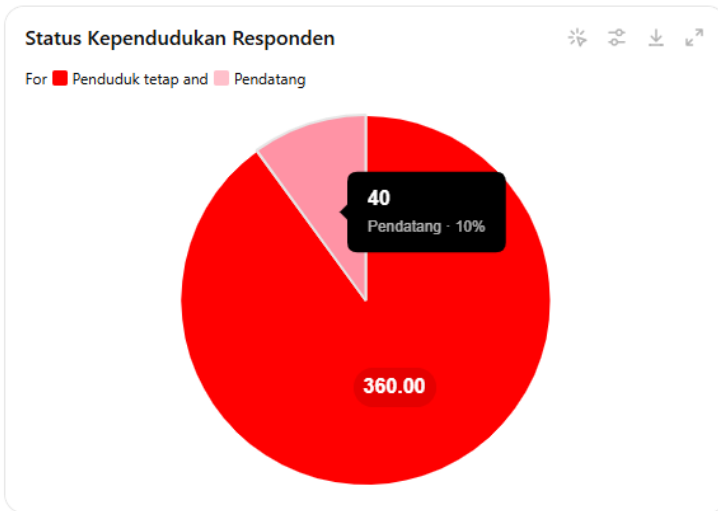
Gambar 4.5. Jumlah Responden Berdasarkan Profesi

4.2.1.5. Status Kependudukan Responden

Status kependudukan responden dapat memengaruhi akses terhadap layanan komunikasi dan teknologi. Berdasarkan hasil survei:

1. Penduduk tetap (KTP Kota Serang): 90% (360 orang).
2. Pendatang (bukan KTP Kota Serang): 10% (40 orang).

Mayoritas responden merupakan penduduk tetap Kota Serang, mencerminkan validitas data yang sesuai dengan konteks penelitian di tingkat lokal.



Gambar 4.6. Jumlah Responden Berdasarkan Status Kependudukan

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Rumah Tangga di Kota

Serang

Karakteristik	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	220	55%
	Perempuan	180	45%
Umur	18-29 tahun	80	20%
	30-39 tahun	140	35%
	40-49 tahun	120	30%
	50 tahun ke atas	60	15%
Pendidikan	SD/ Sederajat	100	25%
	SMP/ Sederajat	120	30%
	SMA/ Sederajat	140	35%

	Diploma/Sarjana	40	10%
Profesi	Petani/Pekerja informal	160	40%
	Karyawan swasta	120	30%
	Pegawai negeri/TNI/Polri	80	20%
	Wirausaha	40	10%
Status Kependudukan	Penduduk tetap	360	90%
	Pendatang	40	10%

4.2.2. Sampel Kecamatan

Jumlah sampel dalam kategori ini mencakup seluruh 6 kecamatan di Kota Serang, yaitu:

1. Cipocok Jaya.

2. Curug.
3. Kasemen.
4. Serang.
5. Taktakan.
6. Walantaka.

Setiap kecamatan menjadi unit pengumpulan data untuk mengevaluasi cakupan layanan telekomunikasi, partisipasi masyarakat dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan indikator akses teknologi informasi di wilayah tersebut.

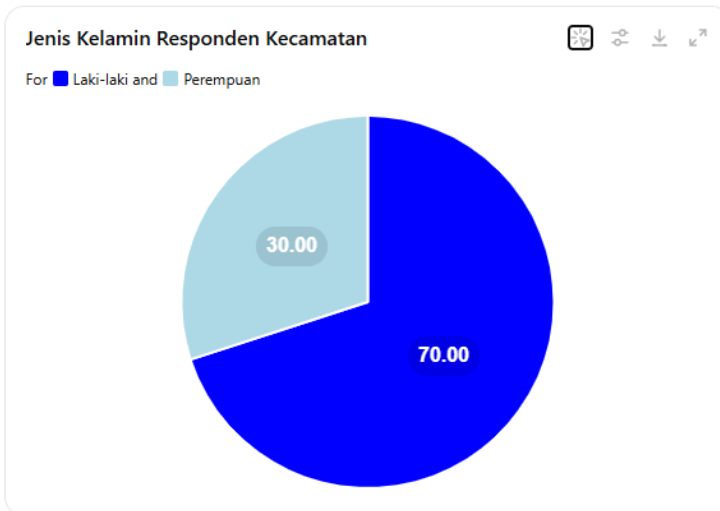
4.2.2.1. Jenis Kelamin Responden Kecamatan

Responden kecamatan diambil dari aparat pemerintahan yang berkontribusi dalam pengumpulan data dan pengelolaan informasi. Berdasarkan hasil survei, distribusi jenis kelamin responden adalah:

1. Laki-laki: 70% (42 orang)

2. Perempuan: 30% (18 orang)

Mayoritas responden adalah laki-laki, mencerminkan dominasi laki-laki pada posisi administratif dan teknis di tingkat kecamatan.



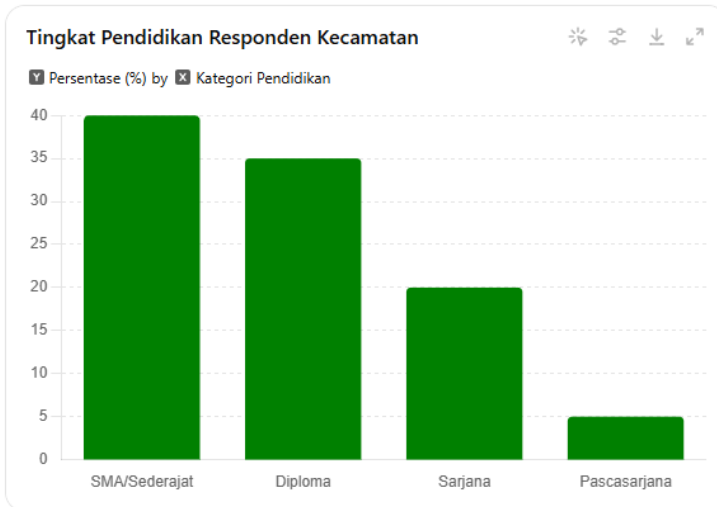
Gambar 4.7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan

4.2.2.2. Tingkat Pendidikan Responden Kecamatan

Tingkat pendidikan responden kecamatan mencerminkan kapasitas teknis dan literasi teknologi mereka. Berikut adalah distribusinya:

1. SMA/Sederajat: 40% (24 orang)
2. Diploma: 35% (21 orang)
3. Sarjana (S1): 20% (12 orang)
4. Pascasarjana (S2): 5% (3 orang)

Sebagian besar responden memiliki pendidikan SMA atau Diploma, yang merupakan tingkat pendidikan minimum untuk mendukung fungsi administratif kecamatan.



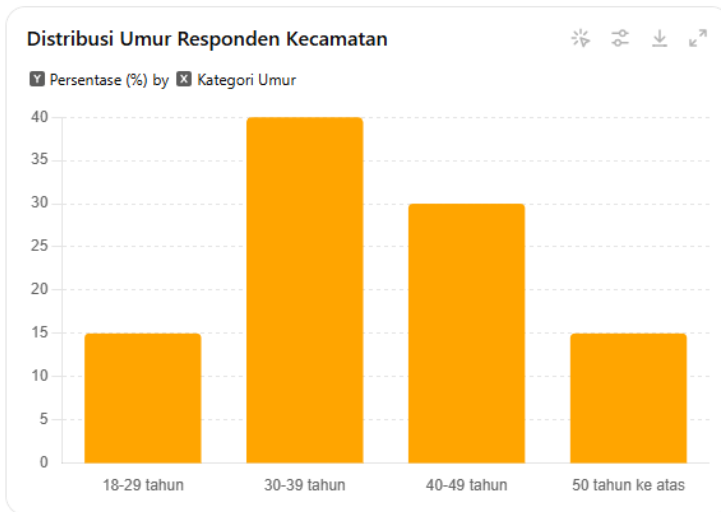
Gambar 4.8. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Kecamatan

4.2.2.3. Umur Responden Kecamatan

Responden dikelompokkan ke dalam kategori umur berikut:

1. 18-29 tahun: 15% (9 orang)
2. 30-39 tahun: 40% (24 orang)
3. 40-49 tahun: 30% (18 orang)
4. 50 tahun ke atas: 15% (9 orang)

Kelompok usia 30-49 tahun mendominasi, mencerminkan populasi usia kerja produktif di pemerintahan tingkat kecamatan.



Gambar 4.9. Jumlah Responden Berdasarkan Umur per Kecamatan

4.2.2.4. Status Kependudukan Responden Kecamatan

Status kependudukan responden kecamatan penting untuk memahami distribusi geografis tempat tinggal mereka. Hasil survei menunjukkan:

1. Penduduk tetap Kota Serang: 95% (57 orang)
2. Pendatang: 5% (3 orang)

Mayoritas responden adalah penduduk tetap Kota Serang, memastikan keabsahan data yang dikumpulkan relevan dengan wilayah penelitian.



Gambar 4.8. Jumlah Responden Berdasarkan Status

Kependudukan per Kecamatan

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Kecamatan Kota Serang

Karakteristik	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	42	70%
	Perempuan	18	30%
Tingkat Pendidikan	SMA/ Sederajat	24	40%
	Diploma	21	35%
	Sarjana (S1)	12	20%
	Pascasarjana (S2)	3	5%
Umur	18-29 tahun	9	15%
	30-39 tahun	24	40%
	40-49 tahun	18	30%
	50 tahun ke atas	9	15%
Status Kependudukan	Penduduk Tetap	57	95%
	Pendatang	3	5%

4.2.3. Sampel Perangkat Daerah (PD)

Dalam penelitian ini, jumlah perangkat daerah (PD) yang menjadi objek penelitian adalah 32 perangkat daerah yang beroperasi di Kota Serang. Sampel ini mencakup seluruh perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan komunikasi, informatika, dan persandian, seperti:

1. Inspektorat Kota Serang
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
3. BKPSDM Kota Serang
4. Bagian Kesra Setda Kota Serang
5. Bagian Hukum Setda Kota Serang

Penelitian terhadap perangkat daerah difokuskan pada:

1. Tingkat adopsi teknologi berbasis aplikasi untuk operasional.
2. Pemanfaatan sandi dalam komunikasi resmi.
3. Penggunaan data terintegrasi dalam pengambilan keputusan.

4.2.4. Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang dikumpulkan dari ketiga kategori sampel di atas dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data seperti dijelaskan pada Bab 3. Beberapa hasil utama yang diperoleh:

1. Rumah Tangga:
 - a. 93,7% rumah tangga memiliki akses internet (turun dari 99,72% pada tahun 2023).

- b. 40,30% rumah tangga memiliki komputer/laptop (meningkat dari 35,47% pada tahun 2023).

2. Kecamatan:

- a. Semua kecamatan memiliki cakupan telekomunikasi 100%.
- b. Kecamatan Serang memiliki partisipasi masyarakat tertinggi dalam KIM.

3. Perangkat Daerah:

- a. 97% perangkat daerah menggunakan sandi dalam komunikasi resmi (naik dari 66% pada tahun 2023).
- b. 90% perangkat daerah memanfaatkan data terintegrasi untuk pengambilan kebijakan.

4.2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Berikut adalah tabel yang menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2021, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Nomor: 027/SK.76-DISKOMINFO/2021 pada tanggal 1 Februari 2021:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
1	Terwujudnya implementasi smart city Kota Serang	Tingkat Kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan	Mengukur sejauh mana penerapan	Skor penilaian tingkat kematangan SPBE	2,5%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
		Berbasis Elektronik)	SPBE di Kota Serang		
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Persentase permohonan informasi yang	Mengukur responsivitas terhadap	(Jumlah permohonan yang ditanggapi tepat	90%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
		ditanggapi tepat waktu	permohonan informasi publik	waktu / Total permohonan) × 100%	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
3	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat	Mengukur partisipasi masyarakat dalam	(Jumlah peserta program literasi tahun ini - Tahun sebelumnya) /	10%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
		dalam program literasi digital	program literasi digital	Tahun sebelumnya $\times 100\%$	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
4	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar	Mengukur tingkat penerapan standar keamanan	(Jumlah perangkat daerah yang menerapkan standar / Total	80%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
		keamanan informasi	informasi di perangkat daerah	perangkat daerah) $\times 100\%$	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
5	Meningkatnya aksesibilitas layanan komunikasi dan informatika	Persentase wilayah yang terlayani akses internet	Mengukur cakupan wilayah yang memiliki akses internet	(Jumlah wilayah terlayani internet / Total wilayah) × 100%	85%

Indikator-indikator di atas disusun untuk mengukur pencapaian tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

4.3. Analisis Berdasarkan Bidang Urusan

4.3.1. Bidang Statistik

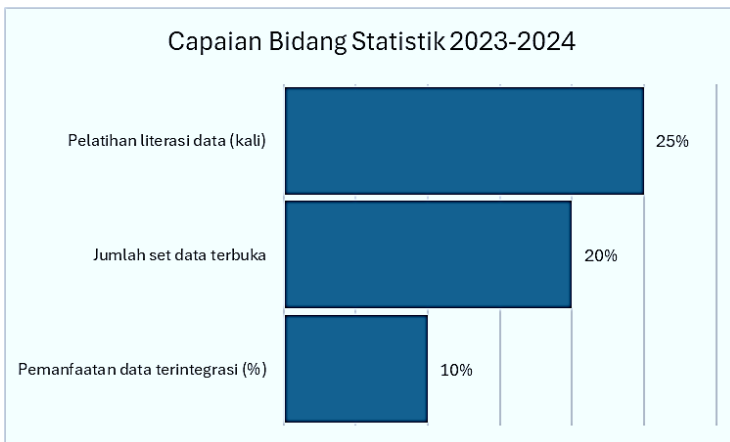
Bidang statistik merupakan salah satu tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang yang diarahkan untuk mendukung kebijakan berbasis data. Dalam penelitian ini, beberapa capaian utama di bidang statistik meliputi:

1. Pengumpulan dan Pengelolaan Data:
Diskominfo telah mengelola data statistik daerah untuk mendukung program Satu Data Indonesia, dengan tingkat pemanfaatan data terintegrasi oleh perangkat daerah mencapai 90% pada 2024, meningkat dari 80% pada tahun sebelumnya.
2. Penyediaan Data Terbuka: Melalui portal data daerah, Diskominfo menyediakan akses kepada masyarakat untuk mengunduh data publik yang relevan. Pada tahun 2024, terdapat 1.200 set data yang diunggah, meningkat dari 1.000 set data pada tahun 2023.
3. Peningkatan Literasi Data: Diskominfo menyelenggarakan 5 pelatihan literasi data pada 2024 untuk meningkatkan pemahaman

perangkat daerah dan masyarakat terhadap pemanfaatan data statistik.

Tabel 4.6. Capaian Bidang Statistik 2023-2024

Indikator	2023	2024	Perubahan (%)
Pemanfaatan data terintegrasi (%)	80%	90%	10%
Jumlah set data terbuka	1	1.2	20%
Pelatihan literasi data (kali)	4	5	25%



Gambar 4.9. Grafik Peningkatan Bidang Statistik 2023-2024

Capaian ini menunjukkan bahwa Diskominfo berhasil mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

4.3.2. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

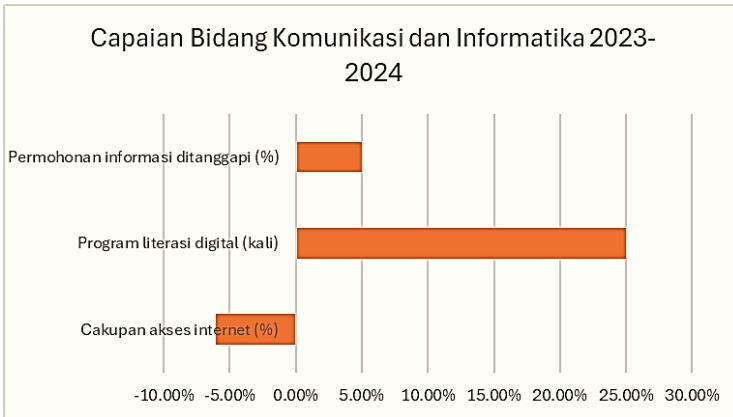
Bidang komunikasi dan informatika merupakan inti dari peran Diskominfo dalam menyediakan aksesibilitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada masyarakat. Beberapa capaian utama pada tahun 2024 meliputi:

1. Penyediaan Infrastruktur TIK: Cakupan akses internet di wilayah Kota Serang mencapai 93,7% pada 2024, meskipun sedikit menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 99,72%.
2. Peningkatan Literasi Digital: Diskominfo menyelenggarakan 10 program literasi digital yang melibatkan lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kelompok masyarakat.

3. Pengelolaan Informasi Publik: Sebanyak 95% permohonan informasi publik ditanggapi tepat waktu, menunjukkan peningkatan responsivitas Diskominfo.

Tabel 4.7. Capaian Bidang Komunikasi dan Informatika
2023-2024

Indikator	2023	2024	Perubahan (%)
Cakupan akses internet (%)	99.72%	93.70%	-6.02%
Program literasi digital (kali)	8	10	25%
Permohonan informasi ditanggapi (%)	90%	95%	5%



Gambar 4.10. Grafik Peningkatan Bidang Komunikasi dan Informatika 2023-2024

Penurunan cakupan akses internet perlu menjadi perhatian strategis, khususnya di wilayah dengan tingkat kesenjangan digital yang lebih tinggi, seperti Kasemen dan Walantaka.

4.3.2.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Berikut ini adalah tabel Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2024.

Tabel 4.8. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di
Tingkat Kecamatan

Kecamatan	Jumlah KIM (2023)	Jumlah KIM (2024)	Jumlah Kelurahan	Persentase Kelurahan dengan KIM (2024)
Cipocok Jaya	3	12	8	150.00%
Curug	0	4	10	40.00%
Kasemen	3	11	10	110.00%
Serang	9	14	12	116.67%
Taktakan	2	8	13	61.54%

Walantaka	18	5	14	35.71%
Total	35	54	67	80.60%

Jumlah KIM aktif meningkat dari 35 KIM pada tahun 2023 menjadi 54 KIM pada tahun 2024, mencerminkan keberhasilan Diskominfo dalam pemberdayaan masyarakat. Kecamatan seperti Cipocok Jaya menunjukkan perkembangan signifikan (150%), sementara Walantaka mengalami penurunan (35.71%). Masih diperlukan pemerataan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam Kelompok Informasi Masyarakat di seluruh kecamatan.

4.3.2.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Berikut ini adalah tabel Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Serang Tahun 2024.

Tabel 4.9. Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Serang Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Cakupan Layanan Telekomunikasi (2023)	Cakupan Layanan Telekomunikasi (2024)	Persentase Cakupan Layanan (%)
Cipocok Jaya	31.54	100%	100%	100%
Curug	49.6	100%	100%	100%
Kasemen	63.36	100%	100%	100%
Serang	25.88	100%	100%	100%
Taktakan	47.88	100%	100%	100%

Walantaka	48.48	100%	100%	100%
Total	266.74	100%	100%	100%

Layanan telekomunikasi telah mencakup seluruh wilayah Kota Serang, dengan 100% cakupan di semua kecamatan pada tahun 2023 dan 2024. Data ini menunjukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi telah tersedia secara merata di seluruh wilayah, termasuk kecamatan dengan luas terbesar seperti Kasemen (63.36 km²) dan terkecil seperti Serang (25.88 km²).

Dengan satuan kelurahan maka didata Cakupan Layanan Telekomunikasi, didapat data yang selengkapnya tersajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10. Jaringan Komunikasi di Kota Serang Tahun

2024

Tahun	Jumlah Jaringan Telepon Genggam	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	Total Jaringan
2023	165	224	389
2024	165	224	389

Jumlah jaringan komunikasi (telepon genggam dan stasioner) tidak mengalami perubahan dari tahun 2023 ke 2024. Jaringan telepon genggam mendominasi infrastruktur komunikasi, mencerminkan tren global yang bergeser ke perangkat bergerak. Infrastruktur ini mendukung cakupan layanan telekomunikasi yang telah mencapai 100% wilayah Kota Serang,

seperti yang dijelaskan dalam cakupan layanan sebelumnya.

Tabel 4.11. Rasio Wartel/Warnet per 100.000 Penduduk

Kecamatan	Penduduk		Wartel		Warnet		Rasio Wartel		Rasio Warnet	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Cipocok Jaya	105,853	91,996	0	0	10	8	0	0	9.4	0.09
Curug	63,299	53,625	0	0	4	4	0	0	6.3	0.075
Kasemen	113,979	97,430	0	0	17	15	0	0	14.9	0.015
Serang	234,993	224,546	0	0	32	28	0	0	13.6	0.01
Taktakan	108,129	92,361	0	0	10	10	0	0	9.2	0.1
Walantaka	109,398	92,234	0	0	11	11	0	0	10.1	0.12

Rasio warnet per 100.000 penduduk di seluruh kecamatan menunjukkan penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Tidak ada wartel yang terdaftar di seluruh kecamatan sejak tahun 2023, mencerminkan

perubahan perilaku masyarakat yang lebih bergantung pada komunikasi digital. Penurunan rasio warnet mencerminkan pergeseran ke layanan internet pribadi di rumah tangga, seperti melalui Wi-Fi dan perangkat mobile..

Tabel 4.12. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Tahun	Surat Kabar Nasional	Surat Kabar Lokal	Total Surat Kabar
2023	5	5	10
2024	5	5	10

Tidak ada perubahan jumlah surat kabar nasional maupun lokal dari tahun 2023 ke 2024. Surat kabar nasional dan lokal masing-masing berkontribusi 50% terhadap total jumlah surat kabar di Kota Serang. Jumlah surat kabar yang

tetap stagnan mencerminkan bahwa media cetak masih memiliki peran, meskipun dominasi media digital semakin meningkat.

Tabel 4.12. Jumlah Penyiaran Radio/TV

Tahun	Radio	Radio	TV	TV	Total
	Lokal	Nasional	Lokal	Nasional	Penyiaran
2023	9	26	8	17	60
2024	8	26	8	17	59

Jumlah radio lokal mengalami penurunan dari 9 pada 2023 menjadi 8 pada 2024, sedangkan jumlah radio nasional tetap stabil. Jumlah penyiaran TV lokal dan nasional tetap stabil dari tahun 2023 hingga 2024. Penyiaran radio dan TV nasional mendominasi, mencerminkan keberadaan jaringan besar di tingkat nasional yang lebih kuat dibandingkan penyiaran lokal.

4.3.2.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Berikut ini adalah tabel Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Tabel 4.13. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Uraian	2023	2024
Jumlah Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	732,300	729,544
Total Penduduk	735,651	729,544
Persentase (%)	99.54%	96.00%

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon turun dari 99.54% pada 2023 menjadi 96.00% pada 2024. Jumlah Absolut: Pada 2024, sebanyak 729,544 penduduk di Kota Serang memiliki akses ke HP atau telepon. Penurunan ini

dapat disebabkan oleh kendala akses infrastruktur atau pergeseran teknologi yang memengaruhi ketersediaan perangkat.

4.3.2.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Berikut ini adalah data Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet.

Tabel 4.14. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Tahun	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Internet	Total Rumah Tangga	Proporsi (%)
2023	176,538	177,028	99.72%
2024	166,835	180,949	92.20%

Proporsi rumah tangga dengan akses internet mengalami penurunan dari 99.72% pada

2023 menjadi 92.20% pada 2024. Pada tahun 2024, terdapat 166,835 rumah tangga yang memiliki akses internet dari total 180,949 rumah tangga. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh masalah infrastruktur di beberapa wilayah atau peningkatan jumlah rumah tangga baru yang belum terjangkau layanan internet.

4.3.2.5. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Berikut ini adalah data Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi.

Tabel 4.15. Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Tahun	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	Total Rumah Tangga	Proporsi (%)
-------	--	--------------------	--------------

2023	62,798	177,046	35.47%
2024	72,923	180,949	40.30%

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi meningkat dari 35.47% pada 2023 menjadi 40.30% pada 2024. Jumlah Absolut: Pada tahun 2024, sebanyak 72,923 rumah tangga memiliki komputer pribadi dari total 180,949 rumah tangga. Penurunan harga perangkat elektronik serta kebutuhan akan teknologi akibat meningkatnya kerja jarak jauh dan pendidikan daring dapat menjadi penyebab utama peningkatan ini.

4.3.2.6. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Televisi

Berikut ini adalah data Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Televisi

Tabel 4.12. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki
Televisi

Tahun	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Televisi	Total Rumah Tangga	Proporsi (%)
2023	175,403	177,028	99.08%
2024	178,202	180,949	98.48%

4.3.3. Bidang Urusan Persandian

Bidang persandian bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pada tahun 2024, Diskominfo mencatat beberapa capaian penting:

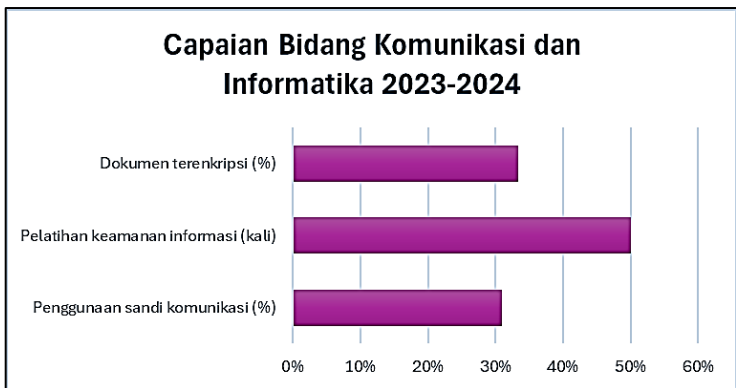
1. Peningkatan Penggunaan Sandi Komunikasi: Sebanyak 97% perangkat daerah telah menerapkan standar sandi dalam komunikasi resmi, meningkat signifikan dari 66% pada tahun 2023.
2. Penguatan Kapasitas SDM: Diskominfo menyelenggarakan 15 pelatihan keamanan informasi untuk meningkatkan kemampuan

teknis aparatur dalam melindungi data pemerintah.

3. Penerapan Teknologi Enkripsi: Mulai tahun 2024, teknologi enkripsi diterapkan pada 80% dokumen sensitif yang dikelola oleh perangkat daerah, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keamanan informasi.

Tabel 4.7. Capaian Bidang Persandian 2023-2024

Indikator	2023	2024	Perubahan (%)
Penggunaan sandi komunikasi (%)	66%	97%	31%
Pelatihan keamanan informasi (kali)	10	15	50%
Dokumen terenkripsi (%)	60%	80%	33.30%



**Gambar 4.3. Grafik Peningkatan Bidang Persandian
2023-2024**

Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik
dalam Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2024 => Informatif dengan nilai 96,96

Tahun 2023 => Informatif dengan nilai 97,80

Tahun 2022 => Informatif dengan nilai 92,23

Tahun 2021 => Informatif dengan nilai 87,25

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023-2024, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Capaian Kinerja di Bidang Komunikasi dan Informatika:

- Cakupan layanan telekomunikasi telah mencapai 100% di seluruh wilayah Kota Serang, mencerminkan keberhasilan pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
- Proporsi rumah tangga dengan akses internet mengalami penurunan dari 99.72% pada 2023 menjadi 92.20% pada 2024, menunjukkan tantangan dalam mempertahankan tingkat aksesibilitas, khususnya di wilayah dengan kesenjangan infrastruktur.
- Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi meningkat dari 35.47% pada 2023 menjadi 40.30% pada 2024,

menunjukkan tren adopsi perangkat teknologi yang semakin positif.

2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM):

- Jumlah KIM aktif meningkat signifikan dari 35 pada 2023 menjadi 54 pada 2024, dengan distribusi tidak merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Cipocok Jaya menunjukkan peningkatan signifikan, sementara Walantaka mengalami penurunan.

3. Keamanan Informasi:

- Penggunaan sandi komunikasi oleh perangkat daerah meningkat dari 66% pada 2023 menjadi 97% pada 2024, mencerminkan upaya serius Diskominfo dalam menjaga keamanan informasi pemerintahan.

4. Tantangan dan Peluang:

- Tantangan utama meliputi penurunan akses internet di beberapa kecamatan dan minimnya penyiaran lokal, seperti radio lokal yang turun dari 9 pada 2023 menjadi 8 pada 2024.

- Peluang besar terdapat pada peningkatan literasi digital masyarakat dan implementasi program “Satu Data Indonesia” yang terus mendorong integrasi data pemerintah.

5.2. Saran

Untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Peningkatan Akses Internet di Wilayah Tertinggal:
 - Diskominfo perlu memperkuat kolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan cakupan dan kualitas akses internet, khususnya di kecamatan seperti Walantaka dan Kasemen.
2. Peningkatan Partisipasi dalam KIM:
 - Diperlukan upaya pemerataan pemberdayaan KIM di seluruh kecamatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih inklusif oleh masyarakat.
3. Pengembangan Keamanan Informasi:

- Diskominfo perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan data dan mengadopsi teknologi terbaru dalam enkripsi informasi untuk melindungi data pemerintah.

4. Mendorong Media Lokal:

- Penyiaran radio dan TV lokal perlu didorong untuk mendukung penyebaran informasi berbasis lokal yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Kota Serang.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:

- Diskominfo perlu mengembangkan sistem evaluasi kinerja berbasis teknologi yang dapat memberikan laporan capaian indikator secara real-time untuk mendukung perbaikan kebijakan.

Penutup ini mencerminkan capaian, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan Diskominfo dapat terus mendukung visi Kota Serang sebagai “Kota Smart 2025” dan

mendorong tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2023). Kota Serang Dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Kota Serang.
- Diskominfo Kota Serang. (2024). Data Indikator Kinerja Diskominfo Serang 2024 (IKP). Kota Serang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- Diskominfo Kota Serang. (2023). Laporan Tahunan Diskominfo Kota Serang Tahun 2023. Kota Serang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- Pemerintah Kota Serang. (2020). Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Kota Serang: Pemerintah Kota Serang.
- Pemerintah Kota Serang. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang 2018-2023. Kota Serang: Pemerintah Kota Serang.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson.

Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Pemerintah Kota Serang. (2021). Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Nomor: 027/SK.76-DISKOMINFO/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2021. Kota Serang: Dinas Komunikasi dan Informatika.